



Implementasi Kebijakan Aplikasi Dsbk (Data Sektoral Bidang Kesbangpol) Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Verra Agustina

Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail: verraagustina2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Aplikasi DSBK (Data Sektoral Bidang Kesbangpol) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Aplikasi DSBK di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of policy*). Variabel isi kebijakan mencakup aspek-aspek seperti tujuan kebijakan, substansi kebijakan, dan kejelasan aturan pelaksanaan. Sementara itu, variabel lingkungan implementasi meliputi faktor-faktor seperti kondisi sosial-politik, dukungan sumber daya, dan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi antar pihak terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Data Sektoral Bidang Kesbangpol.

PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sangat krusial untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan administrasi publik. Untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, pemerintah perlu membangun kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten agar layanan yang diberikan dapat memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi merupakan elemen kunci dalam modernisasi pelayanan publik, yang memungkinkan proses menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Teknologi ini memfasilitasi pengurangan birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan menyediakan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran aktif pemerintah dalam menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Melalui penerapan teknologi informasi, pemerintah dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar, yang pada gilirannya memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan e-government merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses administrasi pemerintah, e-government mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, mempercepat proses birokrasi, serta mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Implementasi e-government mencakup berbagai aspek, seperti digitalisasi dokumen, layanan online, dan platform keterlibatan publik, yang semuanya dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan modern.

Penggunaan e-government tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Implementasi e-government memungkinkan berbagai layanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, e-government juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dengan meminimalkan peluang korupsi melalui penggunaan teknologi informasi yang canggih. Dengan transparansi yang lebih tinggi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, yang pada gilirannya akan mendorong para pejabat untuk bertindak lebih responsif dan bertanggung jawab. Integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

Saat ini, e-government menjadi bagian penting dalam otonomi daerah karena menyediakan alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Dengan implementasi e-government, pemerintah daerah dapat menyederhanakan berbagai proses administrasi, mempercepat pelayanan publik, dan mengurangi biaya operasional melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. E-government juga memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penggunaan e-government berperan penting dalam mendukung integrasi dan koordinasi antarinstansi di tingkat daerah, yang esensial untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, e-government memungkinkan pertukaran data dan informasi yang lebih cepat dan efisien antara berbagai instansi pemerintahan daerah. Hal ini memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan terpadu, mengurangi tumpang tindih program, serta mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, e-government juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pelayanan birokrasi melalui e-government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. E-government memungkinkan interaksi yang lebih mudah antara pemerintah dan masyarakat melalui platform digital seperti situs web, aplikasi, dan media sosial. Melalui e-government, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik seperti pendaftaran perizinan, pembayaran pajak, dan pengurusan dokumen secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Selain itu, e-government mempermudah penyebaran informasi dan komunikasi antara berbagai lembaga pemerintah, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Implementasi e-government memiliki potensi besar dalam mengurangi biaya operasional, mengurangi korupsi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Dengan adopsi teknologi informasi dan komunikasi, berbagai proses administratif dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja dan sumber daya fisik yang mahal. Selain itu, e-government memperkenalkan transparansi dalam administrasi publik, yang dapat mengurangi peluang korupsi dengan membuat setiap langkah proses dapat dipantau dan diaudit. Partisipasi publik juga meningkat melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, melaporkan masalah, dan terlibat dalam pengambilan keputusan secara langsung. Sebagai hasilnya, pelayanan birokrasi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih efisien dalam pelaksanaan tugas, dan lebih berfokus pada pemberian layanan yang tepat sasaran sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 mengatur tentang pedoman pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dalam pelaksanaan peraturan ini ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Badan ini bertanggung jawab memantau dinamika politik daerah, melaporkan perkembangan tersebut secara teratur, dan melakukan evaluasi untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan di daerah tersebut terjaga. Dengan demikian, peraturan ini menjadi landasan bagi Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam mengawasi dan mengelola dinamika politik yang berpengaruh terhadap stabilitas daerah.

Peraturan di atas merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Istilah kebijakan sendiri menurut Dye (2014) berpendapat bahwa: "Kebijakan publik adalah suatu proses yang melibatkan interaksi antara berbagai kekuatan politik dan sosial dalam masyarakat untuk menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah atau lembaga publik". Kebijakan publik melibatkan pemilihan, formulasi, implementasi, dan evaluasi berbagai tindakan atau keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Interaksi antara kekuatan politik, seperti partai politik, serta kekuatan sosial, seperti kelompok kepentingan dan masyarakat umum, merupakan bagian integral dari bagaimana kebijakan ini dibuat dan dijalankan. Tujuan akhir dari kebijakan publik adalah mencapai kebaikan umum atau memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat tersebut.

Subarsono (2011) mengembangkan pemikiran tentang kebijakan publik dalam konteks Indonesia. Kontribusinya terutama berfokus pada bagaimana kebijakan publik direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi di tingkat daerah dan nasional, dengan menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan dan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sementara dalam perspektif Islami (2001) mengacu pada pandangan tentang kebijakan publik dari sudut pandang Islam. Dalam konteks ini, kebijakan publik haruslah selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan, kesejahteraan umum, dan kepentingan bersama. Islami menekankan pentingnya adil dalam distribusi sumber daya dan perlakuan yang merata terhadap semua anggota masyarakat.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Bambang, 2015). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government menandakan kemajuan dalam modernisasi pelayanan publik, upaya berkelanjutan sangat penting untuk mengoptimalkan efektivitasnya, khususnya dalam meningkatkan penggunaan aplikasi dan integrasi antar fungsi administratif (Aina & Ardita, 2021). Meskipun perkembangan sistem e-government di Indonesia mengalami peningkatan secara kuantitas, namun kualitasnya masih belum memadai. Untuk meningkatkan pengembangan e-government secara keseluruhan, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah (Kusuma & Wahyu, 2012).

Implementasi kebijakan aplikasi DSBK (Data Sektoral Bidang Kesbangpol) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya menjadi penting dalam memperkuat efisiensi dan efektivitas pengelolaan data sektoral. Melalui implementasi ini, Kesbangpol dapat mengoptimalkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data sektoral untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, aplikasi DSBK juga memfasilitasi koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan informasi yang terkait dengan keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat (Kamtibmas), yang merupakan pijakan utama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode kualitatif dipilih untuk mendalami konteks, proses, dan pengalaman dalam implementasi kebijakan ini secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana stakeholders di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya memandang, mengalami, dan menjalankan kebijakan DSBK dalam konteks praktik sehari-hari. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi beragam perspektif, dinamika interaksi sosial, dan faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kombinasi antara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan akan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teori-teori, konsep-konsep, dan konteks implementasi kebijakan DSBK. Sementara itu, studi lapangan akan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari stakeholders terkait di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, peneliti akan memperoleh perspektif langsung dari mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini.

Teknik analisis data melalui reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan, penelitian ini akan menggunakan pendekatan sistematis. Reduksi data akan melibatkan proses penyederhanaan dan pengelompokan data yang terkumpul dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Display data akan digunakan untuk menyajikan temuan-temuan dalam bentuk yang terstruktur dan jelas, seperti narasi, tabel, atau diagram. Verifikasi akan dilakukan melalui teknik triangulasi, membandingkan dan mengonfirmasi konsistensi data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan. Penarikan kesimpulan akan mengintegrasikan temuan-temuan utama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi kebijakan DSBK di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, serta implikasinya terhadap praktik dan kebijakan yang ada. Metode ini akan memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Kabupaten Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021. Sebagai salah satu perangkat daerah, Kesbangpol berperan penting sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan ini bertugas membantu Bupati dalam menjalankan tugas-tugas terkait pembinaan kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kesbangpol berada di bawah pengawasan langsung Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam struktur organisasi pemerintahan daerah,

Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan mengelola dinamika politik di tingkat daerah agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, Kesbangpol memastikan bahwa program-program yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan.

Aplikasi DSBK (Data Sektoral Bidang Kesbangpol) merupakan platform digital yang penting dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data terkait dengan berbagai sektor yang relevan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan utamanya adalah mempermudah pemerintah dalam mengakses informasi terkini mengenai dinamika sosial, politik, dan keamanan di berbagai wilayah. Pemanfaatan aplikasi ini, pihak berwenang dapat secara efisien memantau perkembangan situasi kebangsaan, menganalisis tren, dan merencanakan kebijakan yang sesuai untuk memperkuat stabilitas dan persatuan bangsa.

Berdasarkan Manual Book Data Sektoral Bakesbangpol (DSBK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan panduan teknis yang sangat komprehensif untuk instalasi dan penggunaan aplikasi DSBK. Buku manual ini tidak hanya menguraikan konfigurasi teknis seperti pengaturan database dan enkripsi informasi, tetapi juga memberikan panduan detail tentang antarmuka pengguna aplikasi, termasuk manajemen pengguna, pengaturan otoritas akses, dan berbagai dashboard yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan dan menganalisis data sektoral dengan efisien. Panduan ini menjadi sumber yang sangat berharga bagi pengguna yang ingin memaksimalkan potensi aplikasi DSBK dalam memahami dan mengelola data sektoral secara efektif.

Implikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah menegaskan pentingnya pemantauan terhadap dinamika politik di tingkat lokal dan nasional. Melalui regulasi ini, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk secara sistematis melaporkan dan mengevaluasi perkembangan politik, termasuk dalam konteks pelaksanaan Pemilu dan ketertiban umum, dengan pendanaan yang diatur melalui APBN dan APBD untuk menjamin stabilitas politik Indonesia. Aplikasi DSBK dan implementasi peraturan terkait menjadi krusial bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dalam

memantau, mengevaluasi, dan merespons dinamika politik secara efektif, guna mendukung stabilitas dan ketertiban umum di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan Aplikasi DSBK (Data Sektoral Bidang Kesbangpol) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, variabel isi kebijakan (content of policy) menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang dengan tujuan yang jelas untuk memperkuat pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah. Kebijakan ini mencakup aspek penting seperti penetapan tujuan yang spesifik, sasaran yang terukur, prosedur operasional yang tertata baik, serta alokasi sumber daya yang memadai. Namun, meskipun tujuan dan manfaat kebijakan ini terdefinisi dengan baik, implementasinya menghadapi tantangan signifikan terutama terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan infrastruktur teknologi yang cukup.

Dari sisi lingkungan implementasi (context of policy), penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Kompleksitas data yang melibatkan berbagai unit kerja dan institusi terkait juga menjadi hambatan utama dalam pengelolaan dan penggunaan data secara efektif. Selain itu, karakteristik institusi seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan IT dan infrastruktur teknologi yang memadai turut mempengaruhi efektivitas implementasi. Tantangan lainnya termasuk tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran kebijakan, di mana kurangnya pemahaman teknis dan keterampilan dalam manajemen data dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara maksimal.

Secara keseluruhan, Kebijakan Aplikasi Dana Bagi Hasil (DSBK) di Kabupaten Tasikmalaya telah disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek krusial dari variabel kebijakan, termasuk penetapan tujuan yang jelas dan prosedur operasional yang terdefinisi dengan baik. Namun, implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada tantangan signifikan dari lingkungan sekitarnya. Dua tantangan utama yang teridentifikasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan infrastruktur teknologi yang cukup. Kedua faktor ini menjadi fokus utama yang perlu diatasi agar kebijakan ini dapat berhasil secara optimal dan memberikan dampak yang positif sesuai dengan tujuan awalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi Digital Sistem Bukti Kinerja (DSBK) sebagai platform digital telah memungkinkan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya untuk efektif mengumpulkan dan menganalisis data sektoral. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat guna menjaga stabilitas dan harmoni di wilayah tersebut. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola sistem tersebut, serta infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasional aplikasi secara optimal. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan aplikasi DSBK dapat berkontribusi secara lebih efektif terhadap tujuan strategis Kesbangpol dalam memelihara ketertiban dan keamanan di Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina Shafira, Ardita Kurniasiwati. (2021). Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online Di Kabupaten Kulon Progo. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/457>
- Bambang Irawan. (2015). E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Paradigma, Vol. 4 No.3, 2015.
- Islami, M. Irfan. (2001). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi. Jakarta: Aksara.
- Kusuma Dewi Arum Sari, Wahyu Agus Winarno. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governancedi Indonesia. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jeam/article/view/1192>
- Subarsono, AG. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thomas R. Dye. (2014). Understanding Public Policy (12th Edition). Prentice Hall; 12th edition.